

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Persoalan geopolitik global menjadi salah satu penyebab eksternal utama yang memengaruhi dinamika pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ketegangan internasional, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta ketidakstabilan di Asia Tenggara, memberikan dampak signifikan pada harga komoditas, kesulitan perdagangan, dan penurunan investasi asing langsung (FDI). Hal ini berdampak pada ekonomi domestik melalui peningkatan inflasi, melemahnya daya beli, dan terganggunya rantai pasok global. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karenanya, stabilitas geopolitik global menjadi elemen vital dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang terpenting yang tujuannya untuk menunjang peningkatan mutu hidup penduduk nasional, yang dilaksanakan secara terencana, dan berkelanjutan untuk memperbaiki keadaan (Noviatamara et al., 2019). Maka dari itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, dan penguatan daya saing daerah. Pembangunan ekonomi bukan tentang peningkatan pendapatan atau akumulasi kekayaan, tetapi juga tentang memperluas kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap berharga. Dalam perspektif ini, pembangunan harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan

kebebasan substantif manusia, yang meliputi akses kepada pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, dan hak asasi lainnya.

*Economic growth* mencerminkan peningkatan dalam pembuatan barang dan jasa dalam suatu daerah dengan jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilannya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi yang maksimal. Perubahan dalam pendapatan nasional dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, sementara aktivitas ekonomi berperan dalam mempengaruhi perubahan tersebut seiring berjalannya waktu (Sukirno, 2004). Selain menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi, statistik pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bagaimana hasil perluasan ini memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator langkah selanjutnya dalam mempersiapkan kemajuan perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, Distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat serta penguatan keterkaitan ekonomi antarwilayah. Pencapaian tersebut dapat dicapai melalui perkembangan kualitas SDM, pengembangan teknologi, perbaikan infrastruktur dan efisiensi administrasi (Izza, 2024). Kemungkinan keberhasilan tingkat pembangunan dan kekuatan ekonomi negara tersebut meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi (Prayitno & Yustie, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dinilai dari peningkatan output atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah dari waktu ke waktu. Pemerataan

pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja yang luas dapat dicapai dengan *higher economic growth* (Prasetyo, 2008). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sangat signifikan, terutama di daerah perdesaan, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan yang berkurang juga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan produktivitas masyarakat yang berdaya saing tinggi.

Fokus pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat mendukung terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi cenderung mengalami peningkatan produksi, yang berdampak pada kenaikan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, IPM dipakai sebagai indikator untuk mengukur kualitas hidup di suatu negara. (Wiguna & Dinar Iskandar, 2021).

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengalami kemajuan dalam pertumbuhannya, khususnya di bidang ekonomi. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, harus mendukung pembangunan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009-2023 cukup fluktuatif yang dapat dilihat dari grafik berikut ini:



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan ekonomi indonesia**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik 2009-2023 (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia antara tahun 2009 hingga 2023 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan angka yang berkisar antara 4,5% hingga 6,5% hingga tahun 2019, mencatatkan puncaknya di tahun 2010 dan 2011 dengan pertumbuhan sebesar 6,1% dan 6,5%. Pada tahun 2020, akibat pandemik COVID-19, perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar -2,07%. Namun, kondisi mulai membaik pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, kemudian terus berkembang menjadi 5,31% pada 2022 dan 5,05% pada 2023. Meskipun pemulihan pasca-pandemi menunjukkan angka yang positif, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya kembali ke tingkat tertinggi yang tercatat pada awal 2010-an. Grafik ini mencerminkan stabilitas dan daya tahan ekonomi Indonesia meskipun menghadapi tantangan global besar seperti krisis keuangan dan pandemi.

Indonesia, negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 lebih pulau yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Maka, diperlukan pembangunan ekonomi yang terdesentralisasi agar manfaatnya dapat dinikmati secara merata di seluruh daerah. Namun, sampai saat ini, pembangunan ekonomi Indonesia masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 58% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihasilkan dari Pulau Jawa, yang

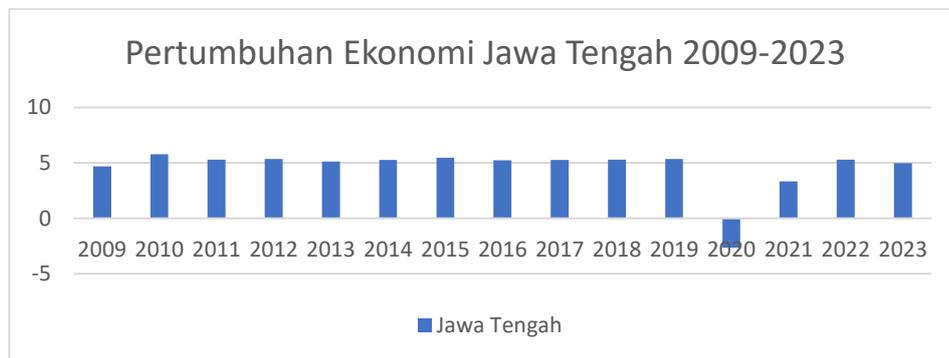
merupakan pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan. Sesmenko Susiwijono menyatakan bahwa fokus saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa sebagai tujuan utama (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2023). Konsentrasi pembangunan ini menciptakan disparitas ekonomi yang signifikan antara Jawa dan wilayah lainnya, khususnya kawasan Timur Indonesia (Kuncoro, 2018).

Meskipun Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian nasional, daerah ini juga menghadapi tantangan besar dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa masalah utama yang masih menjadi penghambat adalah tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah, angka pengangguran yang belum sepenuhnya teratasi, serta Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah di beberapa kabupaten/kota. Misalnya, meskipun rata-rata IPM di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, terdapat ketimpangan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (BPS, 2023).

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dan merupakan provinsi terluas kedua di Pulau Jawa. Salah satu sektor unggulannya adalah industri pertanian, yang menempati posisi kedua terpenting di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah berkontribusi sekitar 14% terhadap total produksi pertanian nasional, terutama pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan tebu. Selain sektor pertanian, Jawa Tengah juga memiliki sektor industri manufaktur dan pariwisata yang terus berkembang.

Tantangan-tantangan ini mencerminkan pentingnya analisis mendalam untuk memahami berbagai aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Untuk mendukung pertumbuhan yang lebih baik, peran

sektor-sektor seperti pertanian, industri manufaktur, dan pariwisata sangat penting, mengingat kontribusinya yang besar terhadap struktur ekonomi Jawa Tengah. Namun, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi di antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2009-2023 cukup stabil yang dapat dilihat dari grafik berikut ini:



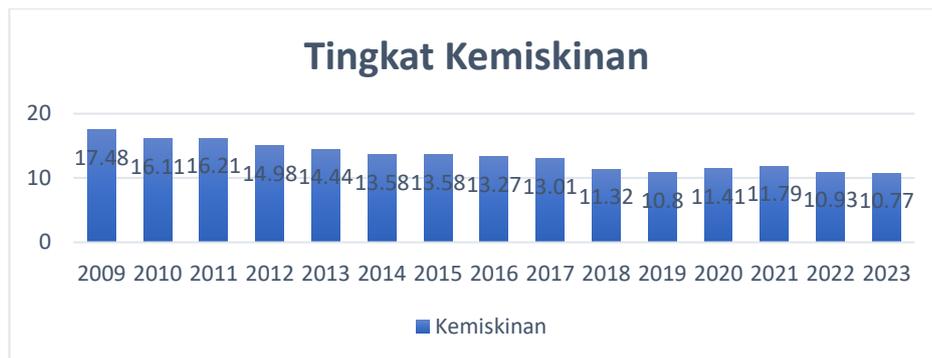
**Gambar 1. 2 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2009-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009-2023 (Data Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode 2009–2023 menunjukkan pola yang relatif stabil dalam kisaran 4% hingga 6% sebelum pandemi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2010 mendekati 7%. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi tajam hingga -2%, mencerminkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sekitar 3%, yang terus meningkat pada tahun 2022 mendekati 5% dan stabil pada kisaran 4,5%-5% di tahun 2023. Meskipun telah menunjukkan stabilitas pasca-pandemi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah belum sepenuhnya kembali ke tingkat puncak seperti tahun 2010. Hal ini menunjukkan resiliensi ekonomi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan besar, meskipun diperlukan strategi yang lebih kuat untuk mendorong pengembangan sektor unggulan,

meningkatkan investasi, serta mendukung pemerataan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Kemiskinan adalah penyakit yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi, terutama kebutuhan kehidupan sehari-hari. Masalah kemiskinan ini terjadi di masyarakat, dan banyak orang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka dalam hidup mereka sesuai dengan standar. Hal ini akan menurunkan produktivitas pekerja di suatu daerah dan mempengaruhi pendapatan masyarakat (Giovanni, 2018). Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan pada tahun 2009-2023 cukup fluktuatif yang dapat dilihat dari grafik berikut ini:



**Gambar 1. 3 Kemiskinan Prov Jawa Tengah 2009-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2009-2023 (Data Diolah)

Grafik *Tingkat Kemiskinan* di Jawa Tengah selama periode 2009-2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009, tingkat kemiskinan berada di angka 17.48%, dan secara bertahap menurun hingga mencapai 10.77% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada fluktuasi di beberapa tahun seperti tahun 2020, di mana tingkat kemiskinan sedikit meningkat menjadi 11.41% akibat dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi. Pemulihan terjadi pada tahun-tahun berikutnya dengan penurunan

bertahap kembali. Penelitian ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana penurunan tingkat kemiskinan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, dan bagaimana faktor lain seperti tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia memengaruhi dinamika ini.

Melihat pada data yang dirujuk oleh BPS per Maret 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan angka 11,04%. Sementara itu, Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,77%. Dalam laporan yang sama, terlihat bahwa kemiskinan di Jawa Tengah cukup mengkhawatirkan, meskipun tidak setinggi DIY. Dengan tingkat 10,77%, Jawa Tengah di peringkat kedua dalam kemiskinan kemiskinan. Selain itu, data ini menyoroti perlunya berkonsentrasi pada program manajemen kemiskinan Jawa pusat untuk memenuhi negara bagian Jawa lainnya dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Dukungan dan pedoman yang tepat dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Maka peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi harus memiliki prioritas utama untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membantu mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan mendukung distribusi pendapatan untuk mengatasi kemiskinan dengan memperluas pekerjaan dan pekerjaan baru (Prayitno & Yustie, 2020).

Masalah kemiskinan dianggap sangat rumit di sini dan memengaruhi bidang sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Kemiskinan disebabkan oleh kualitas pembentukan masyarakat yang buruk, pekerjaan rendah, dan peningkatan populasi tahunan untuk meningkatkan pengangguran. Dalam hal ini, upaya pemerintah

diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui program-program seperti Program Dukungan Penghasilan Langsung (BLT) dan penguatan sosial. Pulau Jawa dikenal sebagai Kegiatan Ekonomi dan Pusat Pemerintah, yang dapat mendukung populasi besar.

Pada Jawa Tengah, pengangguran adalah topik yang sangat urgen untuk meningkatkan umur masyarakat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masalah pengangguran ini tetap menjadi beban bagi pemerintah karena jumlah karyawan dengan populasi yang terus bertambah terus tumbuh (Vallendzo et al., 2020). Tingkat pengangguran yang tinggi di Jawa Tengah dapat memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Pertama, tingkat pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan orang, yang mengurangi daya beli rumah tangga dan konsumsi. Faktanya, konsumsi rumah adalah salah satu komponen utama dari total produksi domestik regional (GRDP), indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terhambat oleh penurunan konsumsi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan komponen evaluasi hasil perekonomian, pengangguran dan kemiskinan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, kemiskinan dan pengangguran berdampak pada *economic growth* karena merupakan salah satu komponen penilaian kinerja perekonomian (Novriansyah, 2018). Tingkat pengangguran di Jawa Tengah pada tahun 2009-2023 cukup fluktuatif yang dapat dilihat dari grafik berikut ini:



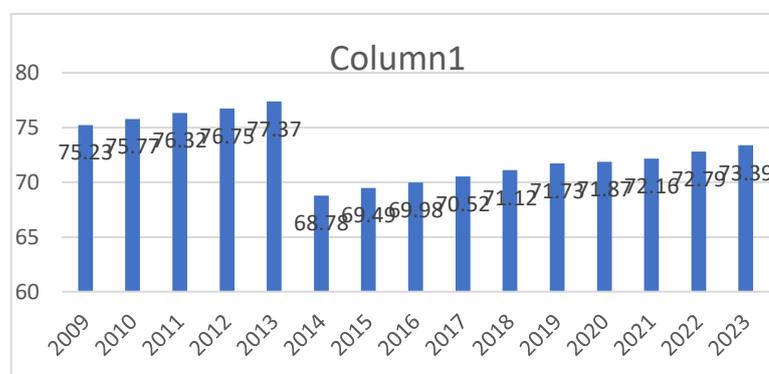
**Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Prov Jawa Tengah 2009-2023**  
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2009-2023 (Data Diolah)

Grafik pengangguran terbuka di Jawa Tengah untuk periode 2009-2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2009 dan 2018, tingkat pengangguran pada 7,33 ° N adalah 4,47%, menghasilkan peningkatan pekerjaan. Namun, pada tahun 2020, ada peningkatan yang signifikan sebesar 6,48% sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, memberi tekanan pada banyak sektor ekonomi. Setelah pandemi, tingkat pengangguran mulai kembali menjadi 5,13% pada tahun 2023, tetapi belum kembali ke tingkat pra-pandemi.

Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan berapa banyak kegiatan ekonomi yang mencapai pendapatan masyarakat pada waktu tertentu (Pangiuk, 2018). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi adalah bagian dari produksi suatu produk melalui pemrosesan kondisi produksi dengan biaya kondisi produksi kotamadya. Dalam kegiatan ekonomi aktual, perubahan dalam produksi barang dan jasa nasional dalam bentuk peningkatan produk industri, pengembangan infrastruktur, peningkatan jumlah bangunan sekolah, peningkatan lapangan kerja di sektor jasa dan produksi, perhiasan dapat dilakukan (Sukirno, 2004).

Indikator utama untuk mengukur kualitas pengembangan adalah Indeks Pengembangan Manusia. IPM mencerminkan kualitas hidup di komunitas kami. Ini

diukur berdasarkan tiga aspek utama: Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup. Masyarakat di negara-negara dengan IPM tinggi diharapkan menjadi lebih produktif, yang pada akhirnya akan mendukung ekspansi ekonomi. Indeks pembangunan manusia berfungsi sebagai standar untuk mengukur kemajuan kualitas hidup seseorang. Warga negara dapat memperoleh manfaat pembangunan sesuai hak mereka atas pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya, menurut IPM (Prayitno & Yustie, 2020). Selain itu, kemiskinan diduga berkontribusi terhadap kesenjangan dalam peningkatan IPM. Hal ini disebabkan keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan yang memadai serta layanan kesehatan yang layak, sehingga berdampak pada stagnasi kualitas SDM dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran (Ningrum et al., 2020). IPM di Jawa Tengah pada tahun 2009-2023 cukup fluktuatif yang dapat dilihat dari grafik berikut ini:



**Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia Prov Jawa Tengah 2009-2023**  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2009-2023 (Data Diolah)

Terlihat dari grafik diatas Jawa Tengah tahun 2009–2023 terdapat beberapa tren yang sangat penting. IPM mengalami penurunan tajam hingga mencapai titik terendah pada tahun 2014 sebesar 68,78, setelah mencapai nilai terbesarnya pada tahun 2013 sebesar 77,37. Setelah jangka waktu tersebut, IPM kembali

menunjukkan tren peningkatan yang stabil hingga mencapai angka 7 pada 3,39 tahun 2023. Mengenai dampak kemiskinan, kemiskinan terbuka, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa IPM dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Perbedaan dalam perkembangan IPM mencerminkan perlunya kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan investasi di sektor kesehatan dan pendidikan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, peneliti menetapkan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah?
2. Apakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah?
3. Apakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat kemiskinan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengangguran memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis bagaimana Indeks Pembangunan Manusia memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Studi ini membatasi ruang lingkungnya pada topik “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah” dalam periode 2009–2023. Fokus ini dipilih agar hasil penelitian lebih relevan dan terarah. Diharapkan bahawa studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara beberapa faktor dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Untuk memastikan ketepatan analisis statistik, penelitian ini menggunakan data resmi yang telah divalidasi, seperti yang bersumber dari BPS.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis kepada pembaca serta menyajikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman atau landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk memperluas variabel-variabel yang diteliti.

### **b. Manfaat praktis**

Temuan penelitian ini diharapkan akan membantu dan mendukung pihak lain dalam proses melakukan penelitian tambahan.

### **c. Manfaat kebijakan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.